

## PNS DIHUJAT TAPI DIDAMBAKAN

Walaupun kredibilitas Pegawai negeri Sipil (PNS) di mata masyarakat saat ini menurun karena banyaknya PNS yang terjerat oleh berbagai kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), namun alternatif menjadi Abdi negara dan abdi masyarakat ternyata masih menjadi ranking teratas bagi kebanyakan masyarakat itu sendiri. Kenyataan ini dapat dilihat setiap diadakan rekrutment CPNS, peserta membludak. Banyaknya pelamar, seringkali menimbulkan berbagai masalah yang berujung pada keributan. Mengapa kejadian yang menjurus pada anarkisme ini selalu belang setiap tahunnya? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pemicu terjadinya keributan yang menjurus pada anarkisme tersebut antara lain:

### ❏ Daya tampung ataupun formasi yang tersedia setiap tahunnya terbatas

Formasi terbatas, sementara animo masyarakat untuk menjadi PNS sangat besar. Walaupun citra PNS kurang baik dimata masyarakat, namun banyak yang lebih memilih untuk menjadi PNS karena walaupun penghasilannya dirasakan relatif kecil pada kenyataannya mereka yang sudah PNS pun masih tetap bertahan karena merasa posisinya lebih relatif aman, dan hari tua dirasakan terjamin karena ada jaminan hari tua (Pensiun). Begitu pula yang belum menjadi PNS bsnyak yang lebih memilih menjadi PNS dari pada pekerjaan lain yang dianggap lebih berisiko.

### ❏ Disinyalir masih adanya praktek KKN

Pada Era Orde Lama pasca kemerdekaan, pemerintah melakukan rekrutmen PNS/ABRI besar-besaran dalam rangka pemulihan (recovery) terhadap kondisi bangsa yang baru terbebas dari penjajah, sehingga perlu adanya penguatan terhadap jalannya pelaksanaan penataan pemerintahan dan pelayanan di segala bidang. Selanjutnya pada Era Orde Baru yang sudah mulai mendekati stabil, sistem kepegawaian sudah mulai ditata sedemikian rupa dengan terbitnya berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah, hanya saja dalam prakteknya masih sering terjadi praktek KKN dan celakanya KKN ini berkembang pesat di era orde baru.

Era Berikutnya adalah era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim orde baru. Reformasi dengan jargonnya Transparansi dan keterbukaan menjadi trend di setiap ceramah, seminar, kampanye ataupun pidato kaum intelektual, praktisi, Politisi bahkan sampai pemuka agama walaupun kenyataannya hanya sebatas retorika. Pada Era ini mulai mencuat isu-isu mengenai politisasi birokrasi. Karena pada era orde baru KORPRI diindikasikan sebagai kendaraan dari salah satu partai politik yang sering disebut sebagai *Single Majority* yaitu Partai Golkar. Maka Pada Era reformasi diterbitkanlah Peraturan Pemerintah yang melarang PNS dan ABRI menjadi anggota partai politik. Hal ini dilakukan untuk menjamin netralitas PNS dan ABRI. Isu lain yang mencuat adalah rasionalisasi PNS/BUMN, karena disinyalir jumlah PNS/BUMN sudah sedemikian besar (Gemuk), baik dari segi jumlah pegawai maupun struktur organisasi. Dengan mengacu pada ungkapan *Miskin Struktur tapi kaya fungsi*, maka mulailah pembenahan-pembenahan baik dari segi kelembagaan, ketata laksanaan dan kepegawaian. Hal ini diimplementasikan dengan dilakukannya merger, antara lain dengan penggabungan antara Departemen Perdagangan dan Perindustrian menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Di BUMN terjadi merger, beberapa bank digabung dalam suatu bank yaitu Bank Mandiri, penghapusan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan dan masih ada lagi yang lainnya.

Kebijakan lain yang muncul di era ini adalah kebijakan Menpan yaitu: *Zerro Growth* (Pertumbuhan nol) yang intinya bahwa pemerintah tidak akan menambah jumlah pegawai negeri. Penambahan dilakukan terbatas pada mengganti sesuai dengan banyaknya pegawai yang dimutasikan, misalnya karena: meninggal. Mengundurkan diri, keluar, dikeluarkan, pindah dan pensiun., dilanjutkan dengan kebijakan *Minus Growth* (pertumbuhan minus), yang maksudnya adalah pengurangan jumlah PNS secara bertahap dari formasi sebelumnya, tapi bukan berarti tidak ada penerimaan, penerimaan pegawai tetap dilakukan dengan catatan jumlah yang diterima harus lebih sedikit dari yang di mutasi, sehingga secara bertahap jumlah pegawai setiap tahunnya akan berkurang.

Ada lagi kebijakan menpan yang tidak boleh mengangkat tenaga honorer, padahal kenyataannya di daerah-daerah bahkan di semua instansi terdapat banyak tenaga honorer. Namun berlawanan dengan itu baru-baru ini Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, sdan pelaksanaannya dilakukan terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Kebijakan yang lebih bersifat politis ini, untuk sementara waktu dapat meningkatkan pamor pemerintah yang berkuasa, namun di sisi lain dapat menjadi bumerang ataupun senjata makan tuan bagi pemerintah itu sendiri. Mengapa demikian?

1. Ternyata jumlah tenaga honorer yang benar-benar honorer di negeri ini sudah sedemikian meledaknya, ditambah lagi tenaga honorer kagetan, sementara formasi yang tersedia terbatas dan menurut perkiraan, walaupun secara bertahap akan dilakukan pengangkatan sampai tahun 2009, namun hal ini tidak menjamin bahwa seluruh tenaga honorer dapat tertampung seluruhnya sampai batas waktu yang di tentukan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tersebut memberi peluang kepada tenaga honorer untuk menuntut pememtah apabila tidak diangkat sebagai CPNS
2. Beban anggaran yang secara otomatis akan meningkat, dan ini akan memberatkan APBN di saat kondisi negara sedang mengalami resesi ekonomi.

Disitulah letak ironisnya sementara pada saat belum diangkat sebagai PNS, berbondong-bondong orang mencari peruntungan untuk menjadi PNS. Untuk yang sudah menjadi tenaga honorer, bertahan dengan kesabarannya. Walaupun sudah bekerja bertahun-tahun bahkan ada yang sampai belasan tahun dengan honor yang minim tetap bersabar sambil ber harap-harap cemas untuk dapat diangkat menjadi CPNS.

Namun apa yang terjadi CPNS yang sudah menjadi PNS? Muncul keluhan lain seperti: gaji kecil, kesejahteraan kurang, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial tidak memadai dan lain-lain.

Apabila kilas balik ke belakang sebetulnya kita harus bangga menjadi salah seorang putra bangsa yang terpilih menjadi PNS dari sekian banyak orang yang mendambakan menjadi PNS. Bidang tugas apapun selayaknya kita syukuri karena memang itu pilihan dan mungkin sudah menjadi jalan hidup kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan setiap tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya, serius, tanpa pamrih, senang hati, ikhlas, jujur, disiplin dan jadikanlah itu sebagai budaya kerja yang harus kita junjung tinggi. Sehingga kinerja akan lebih optimal. Disamping itu kita juga harus menanamkan budaya malu. Kita haru smalu apabila melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan norma yang berlaku. Lakukan hal yang terbaik, seperti kata AA Gym: mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Dengan begitu insya allah akan menumbuhkan citra positif kita sebagai PNS yang akhir-akhir ini sering di hujat tapi juga didambakan oleh masyarakat....